

RENCANA STRATEGIS

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT

TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) PPN Sungailiat tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan agar membuat Renstra sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahun, yang disusun mengacu kepada pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkkan dokumen Renstra ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan.

Sungailiat, 03 April 2020

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Sungailiat



San Tofani



DAFTAR ISI

.....	II
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
B. TUGAS DAN FUNGSI	Error! Bookmark not defined.
1.2.1. SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN	4
1.2.2. SEKSI KESYAHBANDARAN.....	4
1.2.3. SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	5
1.2.4. SUB BAGIAN TATA USAHA.....	5
1.2.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. ALUR PIKIR.....	7
BAB II	8
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
A. PEMBANGUNAN NASIONAL	8
B. PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP	11
4. Sasaran Strategis	12
C. Visi dan Misi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	15
BAB III	25
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	25
A. Faktor Internal	25
1. Kekuatan.....	25
2. Kelemahan.....	26
B. Faktor Eksternal.....	26
1. Peluang.....	26
2. Ancaman/Tantangan.....	26
BAB IV	27
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	27
A. Kebijakan dan Strategi.....	27
1. Peningkatan kualitas pelayanan.....	27



2. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.....	27
3. Pengembangan sistem informasi perikanan.....	28
B. Program Pembangunan.....	28
PENUTUP.....	30



BAB 1

PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah. Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.



A. KONDISI UMUM

Pengembangan, pembangunan, serta pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan salah satu program pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan memegang peranan yang strategis dalam pengembangan usaha perikanan laut maupun pengembangan masyarakat nelayan. Hal tersebut dimungkinkan karena pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan yang di dalamnya terdapat interaksi antar kelompok masyarakat perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Sungailiat terletak di Jalan Yos Sudarso No. 50 Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan letak geografis 01° 51'56" LS dan 106° 07' 20" BT. Awal pembangunan pelabuhan perikanan Sungailiat pada tahun anggaran 1975/1976 dan diresmikan pada tanggal 21 Juni 1976 oleh Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian. Pada awalnya status PPN Sungailiat ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (type C) kemudian sesuai persetujuan Menteri Negara PAN No.B-2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (type B) dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 30 Januari 2009.

PPN Sungailiat mempunyai visi Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya ikan secara berkelanjutan, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan, 3) Memberikan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain:



1. Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhan.
4. Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2002 tentang tarif atas PNBP pada DKP.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2006 tentang perubahan tarif atas jenis PNBP pada DKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.06/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 08/MEN/2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan, yang meliputi :

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

Fungsi pengusaha pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait dipelabuhan perikanan, yang meliputi :

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, PPN Sungailiat memiliki tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut :

SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN

Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

SEKSI KESYAHBANDARAN

Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan



keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi, pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan.





Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Sungailiat Tahun 2020

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPN Sungailiat dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam rangka mewujudkan pelabuhan perikanan sebagai salah satu kawasan Eco Fishing Port, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup DJPT yang berkaitan dengan kebijakan di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat secara implisit juga menjadi tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan dinamika tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan langkah strategis untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat, melalui penjabaran kebijakan secara berjenjang.

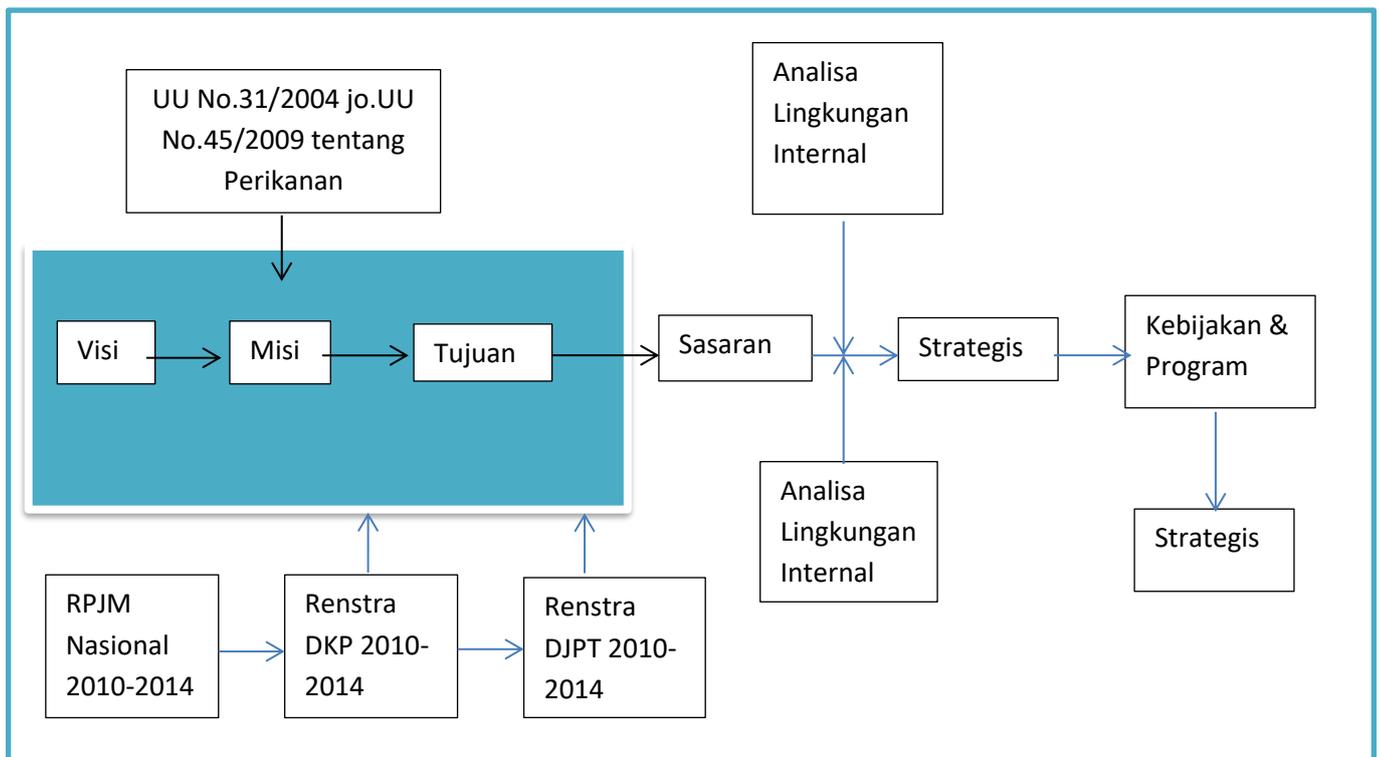
Maksud dan tujuan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Tahun 2020-2024, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dana operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periodekurun waktu 5 tahun ke depan yaitu tahun 2020 s/d 2024. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang,

tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas operasional pelabuhan.

C. ALUR PIKIR

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat tersaji pada Gambar berikut:



Gambar 2. Alur Pikir Penyusunan renstra

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan



Pancasila

- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi



Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang



mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penuhunan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap



Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

4. Sasaran Strategis

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:



- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
- a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai PNBPDitjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBPSDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBPPelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
- a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
 - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap

(persen), dengan indikator output:

- Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);
- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
- Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
- Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
- Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);



- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
 - Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);
 - Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
 - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
 - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
 - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

C. Visi dan Misi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

1. Visi

Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020 – 2024 telah disusun berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 maka Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat adalah **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera di PPN Sungailiat** untuk



mewujudkan “**Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan GotongRoyong**”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan memperlihatkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang di emban Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat adalah:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan tangkap.

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan.
- Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.
- Menciptakan Iklim usaha yang kondusif.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (SDI) yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi

3. Tujuan

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ lembaga lain yang beraktivitas di dalam pelabuhan, sehingga mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan visi dan misi PPN Sungailiat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan yang ingin di capai PPN Sungailiat sampai dengan tahun 2024 adalah :

- 1) **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu



peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap baik pengelola maupun stakeholder perikanan; dilakukan melalui pendampingan/ fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.

- 2) **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistic ikan di pelabuhan perikanan.
- 3) **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
- 4) **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi PPN Sungailiat yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

4. Sasaran Strategis

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh PPN Sungailiat sebagai suatu outcome/ impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Sasaran program PPN Sungailiat di adopsi dari sasaran program DJPT 2020-2024 sebagai berikut:



1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - c. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - d. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - b. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
 - b. Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBP SDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - d. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);

- e. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
- Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
 - Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
 - Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
 - Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
 - Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
 - Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
 - Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);

- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
 - Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
 - Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);
 - Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
 - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
 - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
 - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dapat diukur dengan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut.

a. Stakeholders Prespective (Outcome)

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai tukar nelayan (NTN) dari 104,5 pada tahun 2015 menjadi 106,5 persen pada tahun 2019

b. Customer Perspective (Output)

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.
- b. Nilai produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.

c. Internal Process Perspective (process)

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya tata kelola UPT PPN Sungailiat yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Tingkat penyediaan data perikanan tangkap di UPT PP sesuai kebutuhan (statistik dan logbook) pada tahun 2015-2019 adalah 100 persen.
- b. Tingkat pelayanan kesyahbandaran UPT PP pada tahun 2015-2019 adalah 100 persen.
- c. Tingkat operasional di UPT PP yang memenuhi standar pada tahun 2020-2024 adalah 80 persen.
- d. Persentase dukungan kegiatan untuk pembinaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan di UPT PP pada tahun 2020-2024 adalah 100 persen.
- e. Rasio kecukupan fasilitas UPT PP terhadap kebutuhan, dari 90 persen pada tahun 2015 menjadi 80 persen pada tahun 2020.

- f. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp.dlm ribu) pada tahun 2015-2019 adalah 100%
- g. Persentase dukungan kegiatan untuk penguatan kelembagaan usaha nelayan di UPT PPN Sungailiat pada tahun 2020-2024 adalah 100 persen.

d. Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksanakannya proses untuk menghasilkan output dan outcome PPN Sungailiat. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPT PP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja :
 - Indeks kompetensi dan integrasi pejabat struktural dan fungsional lingkup UPT PPN Sungailiat.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yakni “Tersedianya manajemen pengetahuan UPT PP yang handal dan mudah diakses”, dengan Indikator Kinerja :
 - Persentase unit kerja UPT PPN Sungailiat yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya birokrasi UPT PP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan Indikator Kinerja :
 - Persentase pemenuhan dokumen pendukung Reformasi Birokrasi UPT PPN Sungailiat.
 - Nilai Maturitas SPIP UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.
- d. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Terkelolanya anggaran pembangunan UPT PPN Sungailiat secara efisien dan akuntabel”, dengan Indikator Kinerja :
 - Nilai kinerja anggaran lingkup UPT PPN Sungailiat.

Tabel Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107
		2	Rata-rata pendapatan Nelayan (Rp/nelayan/bulan)	3.952.000	4.229.000	4.548.000	4.911.000	5.360.000
2.	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	3	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80
3.	Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan	4	Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp. Miliar)	928,679	551,370	656,535	657,951	659,201
4	Tata kelola sumber daya perikanan bertanggung jawab	5	Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan dan WPPNRI (persen)	100	100	100	100	100
5	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
		7	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp triliun)	231,311	247,677	266,459	289,167	316,805
		8	Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen)	100	100	100	100	100
6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	9	Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)
		10	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker)	9	12	16	19	23

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024	
	11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	60	61	62	63	64
	12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	82	84	86	88	90
	13	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
	14	Batas tertinggi persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019 (persen)	1	1	1	1	1

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

PPN Sungailiat harus meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan internal maupun eksternal, sehingga dapat menggunakan kekuatan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui hal ini diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats).

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

A. Faktor Internal

1. Kekuatan

Dengan memperhatikan *stakeholders* dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan dan didukung oleh keberadaan PPN Sungailiat.
- b. PPN Sungailiat merupakan sentra perikanan tangkap terbesar di Kepulauan Bangka Belitung
- c. Tersedianya anggaran pembangunan/ peningkatan dan pemeliharaan fasilitas
- d. Jumlah sumberdaya manusia (SDM) di PPN Sungailiat mencukupi untuk kegiatan operasional dan pelayanan.
- e. Memiliki sarana dan prasarana penunjang perikanan tangkap yang lengkap.
- f. Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab.
- g. PPN Sungailiat memiliki lahan seluas 44,91 Ha masih bisa dikembangkan sesuai Master Plan

2. Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- a. Pendangkalan muara, kolam dan alur pelayaran.
- b. Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang kurang memadai, sehingga menghasilkan capaian kinerja belum optimal.
- c. Fasilitas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap, terutama dermaga dan kolam pelabuhan.
- d. Terbatasnya anggaran pembangunan/ peningkatan dan pemeliharaan fasilitas.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap sesuai visi dan misi PPN Sungailiat adalah sebagai berikut :

- a. Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Bangka.
- b. Semakin menguatnya nilai mata uang asing terhadap rupiah akan mendorong pengembangan ekspor dan peningkatan devisa.
- c. Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
- d. Lokasi pemasaran produk perikanan dekat dan mudah di akses.

2. Ancaman/Tantangan

- a. Aktivitas penambangan timah di lokasi sekitar pelabuhan perikanan.
- b. BBM sulit untuk didapatkan.
- c. Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang membingungkan dan menghambat pengembangan usaha perikanan.
- d. Gangguan keamanan dan lemahnya penegakan hukum di laut.
- e. Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.
- f. Banyaknya pelabuhan tangkahan di sekitar PPN Sungailiat

BAB IV

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

A. Kebijakan dan Strategi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dalam statusnya sebagai UPT Pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka arah dan kebijakan organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan sasaran persentase pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar, maka kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam kurun 2 (dua) tahun ke depan adalah melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan terhadap pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; fasilitas dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; fasilitas publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap aktifitas tersebut terus diupayakan secara optimal.

Kebijakan PPN Sungailiat dalam peningkatan pelayanan tersebut ditempuh antara lain melalui upaya penerapan *Standar Operation Procedure (SOP)*; peningkatan kapasitas SDM pelabuhan melalui diklat, bimtek,dll; penyediaan peralatan pendukung pelayanan, pemasangan papan penerangan/informasi pelayanan, penyebaran data dan informasi tepat sasaran, pertemuan dengan *stake holders* melalui kegiatan *coffee morning dan diskusi langsung dilapangan*; dan sosialisasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan pelayanan kepelabuhanan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan

Guna mewujudkan PPN Sungailiat sebagai kawasan *minapolitan*, maka upaya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan terus diupayakan secara optimal untuk memfasilitasi seluruh kegiatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga mampu

mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan maupun usaha pendukung lainnya mulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut meliputi penyempurnaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain : pematangan lahan pelabuhan, MCK, IPAL, cold storage dan docking kapal, sarana perbengkelan, Retaining Wall, jalan akses menuju dock kapal, pengerukan kolam dan alur pelabuhan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan fasilitas operasional lainnya juga akan senantiasa memperoleh perhatian secara proporsional.

3. Pengembangan sistem informasi perikanan

Kebijakan pengembangan system informasi perikanan diarahkan pada peningkatan kualitas, akurasi data sebagai informasi perikanan di PPN Sungailiat dengan beberapa ragam penyampaian informasi baik dalam bentuk buku statistik, leaflet maupun poster dengan pengembangan jejaring distribusi informasi diantaranya melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi, dan *visitor*.

B. Program Pembangunan

Pembangunan perikanan tangkap sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk mewujudkan 4 (empat) pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (penanggulangan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro growth* (pertumbuhan ekonomi), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan melalui 1 (satu) program yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu: (1) Pengelolaan sumber daya ikan, (2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, (3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, (5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, dan (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis Ditjen Perikanan Tangkap.

Program pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat mengacu kepada kebijakan strategis Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penjabaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui 6 (enam) kegiatan tersebut, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang diamanatkan kepada Ditjen Perikanan Tangkap, yakni untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut : (1) meningkatnya volume dan nilai produksi perikanan tangkap, (2) meningkatnya pendapatan nelayan, (3) dan meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).

C. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN). Karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat merupakan Unit Pelaksana Teknis, maka pendanaan untuk mencapai target sasaran utama berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu dari Sekretariat, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan dan Direktorat Sumber Daya Ikan.

Pendanaan dari Sekretariat digunakan untuk Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pendanaan dari Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Tangkap digunakan untuk mendukung pelaksanaan cek fisik kapal dan sertifikasi buat kapal dan awak kapal, sedangkan pendanaan dari Direktorat Pelabuhan Perikanan digunakan untuk pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu untuk mendukung pelaksanaan penyebaran informasi, pelaksanaan tugas kesyahbandaran, pelaksanaan pelayanan di pelabuhan perikanan, pelaksanaan operasional pelabuhan lainnya. Pendanaan dari Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan dan Direktorat Sumber Daya Ikan digunakan untuk mendukung sasaran kinerja dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Secara rinci pendanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dapat dilihat pada lampiran.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dengan mengacu pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap yang telah disesuaikan dengan perubahan pada visi, misi, strategi dan kebijakan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada undang-undang No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No,17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, Peraturan presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Renstra ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta merupakan acuan perencanaan setiap tahun.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari dokumen renstra dimaksud dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dalam pengembangan PPN Sungailiat dan masyarakat luas.

Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari jajaran staf PPN Sungailiat dan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap pada umumnya merupakan hal yang mutlak dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterahkan nelayan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan.



**LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA RENSTRA UPT PPN SUNGAILIAT
PERIODE TAHUN 2020-2024**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	20	30	40	50	60
2.	Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan	2	Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (Rp. Miliar)	0,42	0,44	0,45	0,46	0,46
3.	Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Sungailiat	3	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	40	60	80	100	120
5.	Produksi Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	4	Jumlah produksi perikanan tangkap PPN Sungailiat (juta ton)	4.807	4.859,48	4.953,48	5.027,96	5.114,56
		5	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (lokasi)	1	1	1	1	1
		6	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (persen)	80	80	80	80	80
		7	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	40	40	40	40	40
		8	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (lokasi)	1	1	2	2	2
		9	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (persen)	100	100	100	100	100



SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	10	Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (nilai)	75,07	75,07	75,07	75,07	75,07
		11	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (indeks)	72	72	72	72	72
		12.	Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (%)	100	100	100	100	10
		13	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)





**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JL. YOS SUDARSO NO.50 SUNGAILIAT BANGKA
KEP. BANGKA BELITUNG
TELP. (0717) 92342 FAX: (0717) 92342

